



Desak Kejagung Periksa Anggota Dewan

Terkait Success Fee Penambahan Modal PD Dharma Jaya

BARISAN Insan Muda (BIMA) mendesak penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dan menangkap salah seorang anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta berinisial NA.

Pasalnya anggota dewan tersebut diduga terbukti mengambil dana suksesi atas penyertaan modal ke PD Dharma Jaya yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan daging. "Kejagung jangan berlama-lama memeriksa anggota DPRD DKI tersebut. Segera tetapkan sebagai tersangka dan jembloskan ke penjara," kata Sekjen BIMA Syarief Hidayatullah saat aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, kemarin (3/3).

Berdasarkan keterangan dari tim penyidik, sambung Syarief, dewan berinisial NA secara rutin diperiksa terkait adanya bukti dimaksud. Ironisnya, hingga kini NA masih saja belum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.

Padahal dalam kasus tersebut, ungkap Syarief, Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Potong Hewan PD Dharma Jaya Basuki Ratmo mengaku telah menransfer uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Uang succes fee itu pun menyeret NA. "Jangan biarkan kasus ini mengendap terlalu lama, penyidik Kejagung jangan bermanuver. Bukti sudah kuat dari pengakuan Basuki Ratmo yang telah menransfer 1,5 M," beber Syarief.

Selain berorasi, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Bongkar Kasus Dharma Jaya'. Perwakilan BIMA diterima jajaran Kasubdit Kapuspenkum kejaksaan Agung RI. Pihak Kejagung juga berjanji akan menindak lanjuti kasus tersebut dan segera memeriksa kembali anggota DPRD yang dilaporkan tersebut.

Sebelumnya, tiga Direktur PD Dharma Jaya yakni Direktur Administrasi dan Keuangan RPH Basuki Ranto, Direktur Usaha RPH Agus Indra dan mantan Direksi Rumah Potong Hewan (RPH) Irma

diperiksa Kejagung.

Mereka yang saat itu berkuasa di Perusahaan Daerah (PD) Dharma diperiksa Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung terkait korupsi APBD DKI Jakarta tahun 2010 dan 2011. Untuk menjalankan rencana pergantian jajaran direksi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan (mapping) kinerja BUMD DKI Jakarta.

Seperti diketahui, sebelumnya PD Dharma Jaya juga menjadi salah satu BUMD yang menjadi sorotan Pemprov DKI Jakarta. Sebab tidak bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sempat melontarkan pernyataan akan membongkar direksi BUMD. Satu di antaranya yakni PD Dharma Jaya yang merupakan perusahaan pemasok kebutuhan daging di Jakarta. Usaha yang strategis itu ternyata tidak membuat Dharma Jaya mendapatkan keuntungan, melainkan terus merugi. (wok)